



## Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Kompleksitas Instansi Dan Opini Audit Terhadap Kasus Korupsi (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia)

Wahyu Setio Utomo<sup>1</sup>, Atma Hayat<sup>2</sup>, Novita Weningtyas Respati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

### Abstract

Received: 20 Mei 2025  
Revised: 27 Mei 2025  
Accepted: 01 Juni 2025

*This research examines the effect of internal control effectiveness, the role of internal audit, the level of internal audit authority, internal audit size, ministry size, agency complexity and audit opinion on corruption in ministries/agencies in Indonesia. The effectiveness of internal control is seen from the number of internal control findings and non-compliance with statutory regulations in the BPK audit report, the role of internal auditors in an agency is proxied by the maturity of the SPIP in the BPKP report, the level of internal audit authority in the form of an internal audit organizational structure at the same level echelon I and II, internal audit size is seen from the number of BPKP internal audits, ministry size is proxied from the realization of the expenditure budget (in percentage), agency complexity is proxied by the number of work units, and audit opinion is taken from the BPK audit report. The dependent variable is corruption in ministries/agencies seen from the number of corruption cases in the KPK report with inchract status in 2018-2022. This research uses secondary data with a sample of 405 ministries/agencies in Indonesia, the analysis method used is binary logistic regression. The research results show that the role of internal audit reduces corruption cases. However, the realization of the expenditure budget (in percentage) positively affects the increase in corruption cases. Meanwhile, the effectiveness of internal control, level of audit authority, number of internal auditors, number of work units and audit opinions in ministries/agencies do not affect corruption.*

**Keywords:** Audit Complexity, Audit Opinion, Corruption Prevention, Internal Control Effectiveness.

(\*) Corresponding Author: [nwrespati@ulm.ac.id](mailto:nwrespati@ulm.ac.id)

**How to Cite:** Utomo, W., Hayat, A., & Respati, N. (2025). The Effectiveness of Internal Control, the Role of Internal Audit, Agency Complexity, and Audit Opinion on Corruption Cases. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 264-276. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10553>.

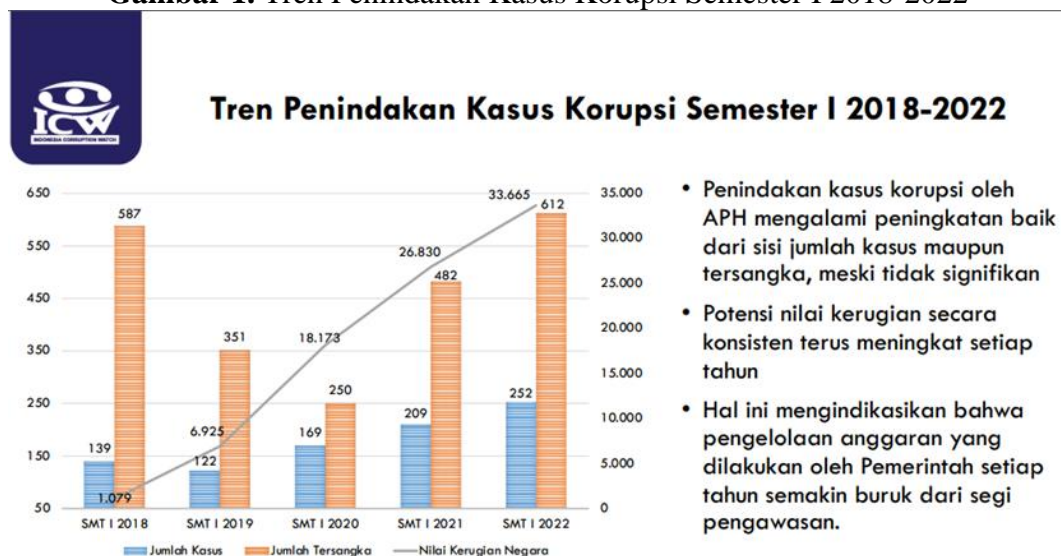
### PENDAHULUAN

Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022, skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara, di mana skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup, dan skor 100 artinya sangat bersih dari korupsi menunjukkan negara yang sangat korup dan menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43, yang berarti indeks korupsi di Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia (Wicaksono & Prabowo, 2022).

ICW pada rentang tahun 2016-2021 menemukan bahwa sedikitnya terdapat 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di Kementerian/Lembaga. ICW juga menemukan ada 76 pegawai/karyawan di

Kementerian/Lembaga terpantau merupakan aktor korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan ada 51 aktor korupsi memiliki jabatan direktur di Kementerian/Lembaga dan terakhir sedikitnya 40 aktor korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat diklasifikasikan memiliki latar belakang pekerjaan lainnya (Wicaksono & Prabowo, 2022).

**Gambar 1.** Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018-2022



**Sumber:** [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Marciano et al. (2021) menyebutkan ada tiga aspek yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Ketiga aspek yang mendukung terciptanya good governance yang baik dalam penelitian ini diwakili dengan sistem pengendalian internal, peran audit internal, tingkat kewenangan audit, ukuran audit internal, ukuran kementerian/lembaga, kompleksitas kementerian/lembaga dan opini audit.

Penelitian ini merujuk dan meneliti ulang dari penelitian yang dibuat oleh Nurhasanah (2016) yang meneliti tentang efektivitas pengendalian internal yang diprosikan dengan jumlah temuan SPI dalam LHP BPK tahun 2012-2014, peran audit internal yang diprosikan dengan jumlah temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam LHP BPK tahun 2012-2014, tingkat kewenangan auditor yang diprosikan dengan unit pengawasan yang dipimpin eselon 1 dan 2 diambil dari LHP BPK, ukuran audit internal yang diprosikan dengan jumlah auditor internal diambil dari laporan BPKP, ukuran kementerian yang diprosikan dengan jumlah satuan kerja serta kompleksitas kementerian yang diprosikan dengan jumlah realisasi anggaran belanja yang diambil dari LHP BPK, yang kemudian diteliti pengaruhnya terhadap kasus korupsi yang datanya diambil dari laporan KPK berstatus inchract.

Pada penelitian ini yang menjadi pembaharuan dan menjadi pembeda adalah alat uji statistiknya menggunakan regresi logistik alasannya karena dari struktur data yang dikumpulkan dalam bentuk time series lebih cocok jika menggunakan regresi logistik; tahun data yang diambil lebih update yaitu dari tahun 2018-2022, menambahkan variabel opini audit dikarenakan terdapat data opini audit yang

dikumpulkan dari LHP BPK sehingga peneliti menambahkan variabel ini untuk melihat pengaruhnya terhadap korupsi; untuk variabel efektivitas pengendalian internal menggunakan data jumlah temuan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dari laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK sedangkan penelitian Nurhasanah (2016) hanya menggunakan jumlah temuan SPI dari LHP BPK; untuk peran audit internal menggunakan data capaian level maturitas dari laporan kinerja BPKP sedangkan Nurhasanah (2016) menggunakan jumlah temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan; untuk ukuran K/L realisasi anggaran diukur dengan persentase (%) sedangkan Nurhasanah (2016) menggunakan nilai besaran nominal.

Kemudian, penelitian ini juga di dukung dari beberapa hipotesis yang di hasilkan dari kajian literature terdahulu yakni Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia (H1); Peran Audit Internal di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H2); Tingkat Kewenangan Audit Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H3); Ukuran Audit Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H4); Ukuran Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H5); Kompleksitas Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H6); Opini Audit di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia (H7). Sehingga pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji posisi atau peran dan efektifitas dari para pihak internal dalam menangani kasus korupsi atau dalam menyikapinya menggunakan peranan dari audit atau pengendalian yang bersifat internal.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif kausal, dengan menggunakan data sekunder, menurut Arifin (2017), pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian dan Lembaga di Indonesia yang memiliki karakteristik jumlah anggaran dan laporan keuangannya selama lima tahun berturut-turut (2018-2022) di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dengan total 448 populasi, dengan rincian populasi sebagai berikut : di tahun 2018 sebanyak 91 K/L, di tahun 2019 sebanyak 89 K/L, di tahun 2020 sebanyak 89 K/L, di tahun 2021 sebanyak 90 K/L dan di tahun 2022 sebanyak 89 K/L. Penelitian ini menggunakan 405 sampel dari 81 kementerian dan lembaga yang diaudit oleh BPK selama lima tahun berturut-turut (2018–2022).

**Tabel 1.** Sampel dalam Penelitian

KETERANGAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bagian Anggaran K/L diaudit BPK	91	89	89	90	89

Jumlah Bagian Anggaran K/L tidak diaudit BPK	10	8	8	9	8
Jumlah sampel akhir 81 (Anggaran K/L diaudit BPK) x 5 tahun = 405	81	81	81	81	81

**Sumber:** Hasil Analisis Penelitian

Terdapat beberapa definisi yang menjadi variable dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Variabel Dependen – Korupsi: Definisi Operasional korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi dan merupakan akibat dari keberadaan monopoli (kekuasaan) diasosiasikan dengan kekuasaan besar tanpa keterbukaan dan tanggung jawab (Arifin, 2017);
- 2) Variabel Independen – Efektivitas: Pengendalian Internal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal pemerintah adalah seluruh proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan kekayaan negara dan kepatuhan terhadap perundang-undangan;
- 3) Variabel Independen - Peran Auditor Internal: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Peran Audit Internal (BPKP) adalah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, dengan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan;
- 4) Variabel Independen – Tingkat Kewenangan Auditor: Menurut KBBI tingkat adalah tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya) dan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat didefinisikan tingkat kewenangan audit adalah jabatan dan kedudukan auditor pemerintah yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Variabel Independen – Ukuran Audit Internal: Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015, ukuran auditor internal adalah banyaknya jumlah auditor internal dalam unit satuan kerja yang disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas Kementerian/Lembaga, jumlah auditor internal dalam Kementerian/Lembaga akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam melaksanakan audit.
- 6) Variabel Independen – Ukuran Kementerian dan Lembaga: Menurut Asare et al. (2021) menyebutkan ukuran kementerian/lembaga adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan besar kecilnya Kementerian/Lembaga dengan beberapa kriteria pengukuran yaitu nilai aset keseluruhan, jumlah satuan kerja, total aset, total pendapatan, belanja dan produktivitas yang semuanya berfungsi sebagai indikator ukuran Kementerian/Lembaga.

- 7) Variabel Independen – Kompleksitas Kementerian dan Lembaga: Kompleksitas Kementerian/Lembaga adalah tingkat pembagian atau diferensiasi dalam organisasi yang memuat di dalamnya spesialisasi, pembagian kerja, tingkatan hierarki organisasi dan penyebaran unit organisasi secara geografis, peningkatan salah satu dari jenis diferensiasi ini secara otomatis akan menambah kompleksitas struktur sebuah organisasi (Huntington, 1973).
- 8) Variabel Independen – Opini Audit: Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Pengumpulan data untuk menggambarkan masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, sebagai berikut:

- 1) Variabel Y – korupsi, diambil dari data laporan tindak pidana korupsi yang berstatus inkracht pada rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan dalam website resmi KPK, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>.
- 2) Variabel X1 – efektivitas pengendalian internal, diambil dari data temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan Kementerian dan Lembaga, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK pada rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, <https://www.bpk.go.id/ihps>.
- 3) Variabel X2 – peran audit internal, data diambil dari laporan kinerja BPKP dengan mengambil data capaian level maturitas SPIP Kementerian dan Lembaga Indonesia, dalam rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan dalam website resmi BPKP, <https://www.bpkp.go.id/konten/3863/Laporan-Kinerja-BPKP.bpkp>.
- 4) Variabel X3 – tingkat kewenangan audit, data diambil dari LHP BPK mengenai susunan organisasi masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk Inspektorat Jendral dengan tingkat setara eselon 1 dan Inspektorat dengan tingkat setara eselon 2.
- 5) Variabel X4 – ukuran audit internal, data diambil dari jumlah audit internal dari laporan kinerja BPKP.
- 6) Variabel X5 – ukuran kementerian dan lembaga, data diambil dari realisasi anggaran pengeluaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang periode tahun 2018-2022, dengan mengambil data dari laporan hasil pemeriksaan BPK, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, [https://www.bpk.go.id/laporan\\_hasil\\_pemeriksaan](https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan).
- 7) Variabel X6 – kompleksitas Kementerian dan Lembaga, data diambil dari jumlah satuan kerja Kementerian/Lembaga dari LHP BPK.

Variabel X7 – opini audit, data diambil dari laporan keuangan masing-masing Kementerian dan Lembaga, dari laporan hasil pemeriksaan BPK, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, [https://www.bpk.go.id/laporan\\_hasil\\_pemeriksaan](https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan) dan diperkuat dengan data dari ikhtisar hasil



a. *The cut value is ,500*

**Sumber:** Hasil Analisis SPSS Penelitian, 2024

**Uji F**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai statistik uji G yang mengikuti distribusi Chi Square sebesar 33,187 dengan p-value 0,000 pada step terakhirnya. Nilai dari statistik tersebut kemudian dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$  yang menghasilkan kesimpulan tolak H0 karena p-value memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata variabel dapat menjelaskan terjadinya kasus korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga di Indonesia.

**Tabel 4.** Nilai Statistik Hitung *Chi Square Omnibus Test of Model Coefficient* dan Signifikansi Model

		<i>Chi-square</i>	df	Sig.
<i>Step 1</i>	<i>Step</i>	33.187	7	,000
	<i>Block</i>	33.187	7	,000
	<i>Model</i>	33.187	7	,000

**Sumber:** Hasil Analisis SPSS Penelitian, 2024

**Uji t**

Tabel 5. di bawah merupakan tabel yang menyajikan nilai statistik wald yang dapat digunakan untuk menentukan signifikansi variabel secara parsial. Dalam tabel di atas, misalkan, diketahui bahwa nilai dari variabel SP (efektivitas pengendalian internal, IA (peran audit internal), RA (ukuran K/L) dan KO (kompleksitas K/L) masing-masing berurutan adalah sebesar 5.784, 32,314, 20,493 dan 12.730 yang jika dibandingkan dengan nilai  $\chi^2 (0.05,1)$ , yaitu sebesar 3,841 nilainya lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, ukuran dan kompleksitas Kementerian/Lembaga memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan kecenderungan terjadinya kasus korupsi Kementerian Lembaga di Indonesia tahun 2018-2022.

**Tabel 5.** Hasil Uji T

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Ket
<i>Step 1<sup>a</sup> SP(1)</i>	.1,201	.790	5.784	1	.000**	3.323	<b>Diterima</b>
IA(1)	2,807	,511	32,314	1	,000**	16,560	<b>Diterima</b>
SO(1)	-19.553	7283.576	.000	1	.998	.000	Ditolak
JA	.000	.000	1.040	1	.308	1.000	Ditolak
RA	,417	,069	20,493	1	,000**	1,517	<b>Diterima</b>
KO	.001	.000	12.730	1	.000**	1.001	<b>Diterima</b>
OA(1)	-1.020	1.059	.928	1	.335	.361	Ditolak
<i>Constant</i>	-2.275	1.210	3.532	1	.050**	.103	

a. *Variable(s) entered on step 1:* SP, IA, SO, JA, RA, KO, OA.

**Sumber:** Hasil Analisis SPSS Penelitian, 2024

Keterangan: Uji statistik Wald dibandingkan dengan  $\chi^2(0,05,1)=3,481$  atau  $\chi^2 (0,10,1)=2,705$

**Interpretasi Odd Ratio (Kecenderungan)**

Hasil regresi logistik biner diketahui bahwa variabel-variabel penjelas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y adalah variabel SP, IA, RA, dan KO pada taraf signifikansi atau  $\alpha=0,05$  (5%) sedangkan variabel sedangkan variabel lainnya tidak bernilai signifikan secara statistik.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal memengaruhi peningkatan kasus korupsi di kementerian dan lembaga.. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 1,201. Semakin sedikit temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka risiko terjadinya kasus korupsi semakin kecil namun semakin banyak temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka semakin tinggi risiko terjadinya kasus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Hawatmeh & Al-Hawatmeh (2016); Apriastanti & Widajantie (2022); Firmansyah (2021); Jehandu et al. (2019); Marciano et al. (2021); Ningsih & Haryanto (2022); Nurhasanah (2016); Saleh & Ratmono (2017); Shah (2006); Sujeewa et al. (2018); Umar et al. (2021); Windarti (2015), dimana efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia.

#### **Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 2 menyatakan Peran Audit Internal di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 2 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 2,807. Sehingga semakin tinggi nilai maturitas spip yang artinya semakin baik peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan dapat menurunkan kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga, namun sebaliknya, semakin banyak jumlah temuan maturitas spip yang artinya semakin kurang efektif peran audit internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan menaikkan kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Hawatmeh & Al-Hawatmeh (2016); Apriastanti & Widajantie (2022); Firmansyah (2021); Jehandu et al. (2019); Marciano et al. (2021); Ningsih & Haryanto (2022); Nurhasanah (2016); Saleh & Ratmono (2017); Shah (2006); Sujeewa et al. (2018); Umar et al. (2021); Windarti (2015), dimana peran audit internal di Kementerian/Lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi.

#### **Pengaruh Tingkat Kewenangan Auditor Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 3 menyatakan tingkat kewenangan audit berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 3 ditolak. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,998 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar -0,000. Sehingga semakin tinggi struktur organisasi auditor setingkat eselon I maka akan semakin naik kasus korupsi di Kementerian/Lembaga dan sebaliknya semakin rendah struktur organisasi auditor setingkat eselon II maka semakin tinggi kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2016); Utomo et al. (2018); Wicaksono & Prabowo (2022); Nahartyo & Haryono (2018; Panji & Utomo (2023), dimana tingkat kewenangan audit tidak berpengaruh positif terhadap kasus korupsi.

#### **Pengaruh Ukuran Audit Internal Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 4 menyatakan ukuran audit internal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 4 ditolak. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,308 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar ,000.

Sehingga semakin banyak jumlah auditor internal maka akan dapat mendeteksi/menurunkan kasus korupsi, namun sebaliknya semakin sedikit jumlah auditor internal maka akan semakin tinggi kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan teori semakin banyak jumlah auditor maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus korupsi namun semakin sedikit jumlah auditor maka semakin besar kemungkinan terjadinya kasus korupsi, yang terjadi dalam penelitian ini jumlah auditor yang banyak ternyata kasus korupsinya tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah (2016); Utomo et al. (2018); Wicaksono & Prabowo (2022); Fisman & Gatti (2002); Lorensa et al. (2018); Nahartyo & Haryono (2018); Yanti & Nurmala (2020), dimana ukuran audit internal tidak berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

#### **Pengaruh Ukuran Kementerian/Lembaga Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 5 menyatakan Ukuran Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 5 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,417.

Penggunaan anggaran yang tidak efisien salah satunya diakibatkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga berisiko mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Semakin besar ukuran Kementerian/Lembaga yang diprosikan dengan persentase realisasi anggaran belanja maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, namun semakin kecil persentase realisasi anggaran belanja maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arsandi (2022); Fisman & Gatti (2002); Nurhasanah (2016); Wicaksono & Prabowo (2022); Windarti (2015); Faraitody Teguh & Bahtiar (2021); Wicaksono & Prabowo (2022); dengan hasil tidak signifikan : (Saleh & Ratmono (2017). Dimana ukuran Kementerian/Lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

#### **Pengaruh Kompleksitas K/L Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 6 menyatakan kompleksitas K/L berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 6 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,001.

Satuan kerja memiliki peran krusial dalam mempengaruhi tingkat korupsi, penerapan prinsip-prinsip good governance, perencanaan yang baik, pemisahan tugas yang jelas, pengawasan yang efektif, serta budaya organisasi yang menghargai integritas dan transparansi akan membantu mengurangi risiko terjadinya kasus korupsi di Kementerian/Lembaga. Sehingga semakin banyak jumlah satuan kerja maka akan semakin tinggi kasus korupsi di Kementerian/Lembaga, namun sebaliknya akan semakin sedikit jumlah satuan kerja maka semakin rendah kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriastanti & Widajantie (2022); Indriastuti & Ifada (2011); Liu & Lin (2012); Nurhasanah (2016) Batul & Ngumar (2019); Ningsih & Haryanto (2022); Nugrahaeni et al. (2019); Pertiwi & Haryanto (2022). Dimana kompleksitas K/L berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

### **Pengaruh Opini Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi**

Hipotesis 7 menyatakan Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 7 ditolak. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana  $\beta$  memiliki tingkat signifikansi = 0,335 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar -1,020.

Opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi dapat diuraikan bahwa opini audit adalah pendapat profesional yang diberikan oleh auditor independen setelah mengevaluasi kewajaran laporan keuangan suatu entitas, opini ini tidak secara langsung terkait dengan penilaian atas potensi kasus korupsi di dalam organisasi tersebut. Opini audit lebih berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan kewajaran laporan keuangan, auditor akan menilai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apakah ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020), dimana opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh : Husna et al. (2017); Ningsih & Haryanto (2022); Nugrahaeni et al. (2019); Rini & Sarah (2015); Saleh & Ratmono (2017); Syahrir & Suryani (2020); Utomo et al. (2018); Wicaksono & Prabowo (2022), dimana opini audit berpengaruh terhadap kasus korupsi.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan membuktikan ada pengaruh yang signifikan untuk efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, ukuran Kementerian/Lembaga dan kompleksitas instansi terhadap jumlah kasus korupsi di Kementerian/Lembaga Indonesia. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan ada pengaruh yang signifikan untuk tingkat kewenangan auditor, ukuran audit internal dan opini audit terhadap jumlah kasus korupsi di Kementerian/Lembaga Indonesia.

### **REFERENSI**

Al-Hawatmeh, O. M., & Al-Hawatmeh, Z. M. (2016). Evaluation of Internal Control Units for the Effectiveness of Financial Control in Administrative Government Units: A Field Study in Jordan. *European Scientific Journal, ESJ*,

- 12(13), 225–256. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n13p225>
- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(2), 728–737. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i02.45357>
- Arifin, J. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Universitas Islam Indonesia. [https://pak.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/Akuntansi-Sektor-Publik\\_compressed.pdf](https://pak.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/Akuntansi-Sektor-Publik_compressed.pdf)
- Arsandi, S. A. (2022). The Grease of The Wheel di Indonesia: Pengaruh Korupsi terhadap Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938>
- Asare, E. T., Duho, K. C. T., Agyenim-Boateng, C., Onumah, J. M., & Simpson, S. N. Y. (2021). Anti-Corruption Disclosure as a Necessary Evil: Impact on Profitability and Stability of Extractive Firms in Africa. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 531–547. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0173>
- Batul, F. H., & Ngumar, S. (2019). Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Kompleksitas Tugas Auditor Terhadap Pendektasian Kecurangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1969/>
- Faraitody Teguh, D., & Bahtiar, D. (2021). The Effect of Accountability of Rural Fund Management and Internal Control to Prevent Corruption in Villages of Bojongpicung District - Cianjur. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 12(2), 129–139. <https://doi.org/10.18196/jbti.v12i2.12753>
- Firmansyah, I. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di PT Perkebunan Nusantara VIII. *LAND JOURNAL*, 1(2), 138–148. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.705>
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. *Journal of Public Economics*, 83(3), 325–345. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00158-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00158-4)
- Huntington, S. P. (1973). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. <https://pdfs.semanticscholar.org/bf7d/7528a7d3614f3550ec9ef1b869f7f7d731a1.pdf>
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016). *EProceedings of Management*, 4(2), 1637–1642. <https://jitl.web.id/index.php/management/article/view/1426>
- Indriastuti, M., & Ifada, L. M. (2011). Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud (Studi Kasus pada Bank Umum Tahun 2010). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 168–176. <https://doi.org/10.30659/ekobis.12.2.168-178>
- Jehandhu, V., Salle, A., & Layuk, P. K. A. (2019). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi di Pemerintah Provinsi Papua. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(3), 114–131. <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i3.1097>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*,

- 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Lorensa, C. N., Falah, S., & Sanggenafa, M. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Komponen Struktur Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah (JAKED)*, 13(2), 13–25. <https://doi.org/10.52062/jakd.v13i2.1433>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>
- Nahartyo, E., & Haryono. (2018). Magnitude of Corruption, Rationalization, and Internal Control Quality: An Experimental Study on Subsequent Offense. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(2), 164–179. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.09>
- Ningsih, S. T. S., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36367>
- Nugrahaeni, S., Samin, S., & Nopiyanti, A. (2019). Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit. *EQUITY*, 21(2), 181–198. <https://doi.org/10.34209/equ.v21i2.643>
- Nurhasanah. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi, dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 27–48. <https://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/35>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38601>
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33899>
- Rini, R., & Sarah, A. (2015). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. *ETIKONOMI*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1875>
- Saleh, L. O. I. H., & Ratmono, D. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18285>
- Shah, A. M. (2006). *A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers (English)* (4039; WPS).

- <http://documents.worldbank.org/curated/en/216941468339553694/A-practitioners-guide-to-intergovernmental-fiscal-transfers>
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Khatibi, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees. *International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL)*, 16(5), 52–57. <https://ijbel.com/vol-16-august-2018-issue-5/>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). *Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Umar, H., Apriani, U., & Purba, R. B. (2021). The Roles of the Government Internal Control System to Minimize Corruption Through the Fraud Star. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n3p407>
- Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Kementerian/Lembaga di Indonesia). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(5), 85–96. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1403>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 329–354. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2384>
- Yanti, M., & Nurmala, P. (2020). Pengaruh Kompleksitas Auditor, Profesionalisme Auditor, dan Whistleblower terhadap Efektifitas Kemampuan Auditor dalam Pembuktian Kecurangan. *EkoPreneur*, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.32493/ekop.v2i2.10249>